

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Literasi Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Literasi Keuangan

Seseorang dengan literasi keuangan yang baik, akan mampu memandang uang dengan sudut pandang yang berbeda serta mempunyai kendali atas kondisi keuangannya. Orang tersebut akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara memanfaatkan terhadap uang yang dimilikinya.

Menurut OJK (2020) definisi literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Lusardi, 2013 yang dikutip oleh Aprinhasari dan Widiyanto, 2020 bahwa literasi keuangan terdiri dari berbagai keterampilan dan pengetahuan tentang keuangan yang dimiliki seseorang untuk dapat mengelola dan menggunakan sejumlah uang untuk meningkatkan taraf hidup dan mengejar kesejahteraan. Pengetahuan tentang keuangan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh individu untuk mencapai kehidupan yang sukses.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa literasi keuangan akan berbanding lurus dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan. Apabila semakin bagus literasi keuangan yang dimiliki maka akan semakin tepat seseorang dalam mengambil keputusan keuangan dan semakin baik dalam mengelola keuangan.

2.1.1.2 Tingkat Literasi Keuangan

Tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian (OJK, 2017), yakni:

1. Well literate, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak

dan kewajiban mengenai produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2. Sufficient literate, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban mengenai produk dan jasa keuangan.
3. Less literate, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. Not literate, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

2.1.1.3 Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan

Menurut OJK (2013) literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*;
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Adapun manfaat literasi keuangan bagi masyarakat menurut OJK (2013), yaitu :

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan;
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik;

2.1.1.3 Pengukuran Tingkat Literasi Keuangan

Menurut OJK (2020) definisi literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu literasi keuangan pada UMKM dapat diukur melalui :

- a. Pengetahuan

Literasi keuangan sendiri berperan sebagai suatu kumpulan dalam pengetahuan tentang keuangan serta mengimplementasikannya melalui suatu bentuk keputusan keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sikap

Literasi keuangan menumbuhkan suatu bentuk keputusan yang harus dilakukan oleh individu dalam aspek finansialnya.

c. Perilaku

Literasi keuangan memiliki suatu kemampuan individu yang dilandasi dengan kepercayaan diri sendiri dalam menggunakan pengetahuan keuangan dalam menggunakan produk finansial dengan baik.

Pada setiap indikator diatas terdiri dari beberapa aspek yaitu :

a. Akuntansi

Dalam aspek ini pengetahuan tentang akuntansi dalam UMKM adalah pencatatan keuangan yang dilakukan UMKM. Akuntansi UMKM, sangat membantu dalam upaya UMKM untuk naik kelas (ubico.id). Dalam upaya tersebut, diperlukan salah satunya adalah pencatatan yang baik. Contohnya membuat catatan aktivitas keuangan atau laporan keuangan. Laporan keuangan termasuk alat komunikasi utama dengan pihak luar (eksternal) dalam hal menilai kelayakan usaha. Hal tersebut nantinya berguna untuk pengambilan keputusan keuangan.

b. Manajemen Keuangan

Literasi keuangan sangat berkaitan dengan manajemen keuangan, semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang maka baik pula manajemen keuangan yang dimilikinya. Manajemen keuangan merupakan suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu bisnis. Manajemen keuangan meliputi aktivitas. Termasuk kegiatan pengelolaan, perencanaan dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan (jurnal.id, 2021).

c. Perbankan

Peran bank dalam mengembangkan UKM (Usaha Kecil Menengah) jelas cukup penting. Bank sendiri merupakan suatu lembaga yang bergerak pada jasa keuangan. Lembaga ini dibutuhkan masyarakat dalam kaitannya dengan

penyediaan dana modal untuk keperluan pengembangan usaha yang tengah dijalankan (retizen.republika.co.id, 2021).

Dengan demikian peningkatan pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat berdampak pada partisipasi yang aktif dalam kegiatan terkait keuangan serta perilaku keuangan yang lebih positif pada seorang individu. Selain itu, kaitan antara perilaku dengan sikap seseorang terlihat pada seseorang yang memiliki sikap positif untuk jangka panjang kemungkinan besar akan menunjukkan perilaku keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang memiliki sikap keuangan untuk jangka pendek.

2.1.2 *Financial Technology (Fintech)*

2.1.2.1 *Pengertian Financial Technology (FinTech)*

Financial Technology (FinTech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi sehingga mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya harus dilakukan secara tatap muka kini dapat melakukan transaksi dengan jarak jauh dan dalam hitungan detik saja (BI, 2018). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 menerangkan *FinTech* adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya. Secara umum dan dalam arti luas, *FinTech* menunjuk pada penggunaan teknologi yang dapat memberikan solusi-solusi keuangan (Arner, et.al, 2015).

Terdapat 5 kriteria *FinTech* menurut Bank Indonesia (peraturan.bpk.go.id, 2017) :

1. Bersifat inovatif
2. Dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis finansial yang telah eksis
3. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

4. Dapat digunakan secara luas
5. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Menurut OJK (2021) jenis-jenis *FinTech* bagi UMKM, sebagai berikut:

1. Pembukuan dan Pengaturan Keuangan

Pada dasarnya penerapan teknologi keuangan atau *FinTech* adalah untuk mempermudah pelaku UMKM dalam memonitor transaksi keuangan sehingga dapat diketahui keuntungan dari usaha yang mereka jalankan. Dengan adanya *FinTech* berbasis pembukuan ini pastinya kan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pencatatan aktivitas keuangan usahanya. Salah satu contohnya adalah Buku Kas.

2. P2P (Peer to Peer)

Peer to peer lending adalah sebuah metode pinjaman yang menghubungkan langsung individu yang membutuhkan dana pinjaman dengan orang lain yang menyediakan pinjaman tersebut. Peer to peer lending merupakan layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender (pemberi pinjaman) dan debitur atau borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Contohnya dapat berupa Kredit Pintar atau Modal Rakyat.

3. Digital Payment System

Jenis *FinTech* ini memberikan pelayanan berupa pembayaran dan dompet digital yang bisa digunakan untuk transaksi non tunai. Payment Gateway dan E-Wallet merupakan yang masuk dalam kategori jenis ini. *FinTech* ini memudahkan UMKM melakukan pembayaran dan melakukan pengiriman uang tanpa melewati bank konvensional. Misalnya bayar belanja online, transfer sesama pengguna dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah Go-pay milik Gojek.

Peneliti menyimpulkan bahwa *FinTech* dapat menggantikan peranan bank dalam hal pembiayaan UMKM dengan lebih efektif dan efisien karena dalam penggunaan *FinTech* biaya administrasi lebih murah dan tidak harus datang ke kantor layanan. Selain itu *FinTech* telah mengubah sistem pembayaran di

masyarakat serta dapat mempermudah dalam melakukan pembukuan usahanya. Sehingga UMKM yang sedang berkembang bisa sangat terbantu untuk menjalankan kegiatan operasional bisnisnya hingga menjadi entitas yang berdaya. Oleh karena itu, UMKM harus mempertimbangkan penggunaan *FinTech* dalam perkembangan usahanya.

2.1.2.2 Manfaat *FinTech*

Manfaat *FinTech* bagi UMKM menurut Hamzah & Suhardi (2019), yaitu:

1. Akses mudah bagi UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan lain-lain

Selain kebutuhan pembiayaan, proses bisnis dan pembayaran yang menjadi sederhana termasuk peran *FinTech* untuk memberikan akses mudah bagi UMKM. Misalnya mempermudah perhitungan harga pokok produksi, menyusun laporan keuangan, menghitung pajak secara komputerisasi, melakukan transfer non tunai dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Dengan adanya *Fintech*, proses bisnis tersebut dapat dilakukan dengan waktu dan biaya secara efisien.

2. Meningkatkan literasi keuangan UMKM

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK, hanya 67,8% orang Indonesia menggunakan produk keuangan. Masih ada 32,2% yang belum menggunakan produk keuangan. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu jika *FinTech* dapat diterapkan maka literasi keuangan masyarakat Indonesia juga ikut meningkat.

2.1.2.3 Pengukuran *FinTech*

Menurut Mariah & Dara (2020) *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu sistem / sistem informasi. Teori ini merupakan salah satu model yang populer untuk memprediksi kegunaan dan penerimaan sistem informasi dan teknologi *by individual users*. Dalam TAM

terdapat dua faktor yang relevan dalam perilaku penggunaan terhadap teknologi, yaitu:

1. Persepsi Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*).

Perceived Usefulness sebagai keyakinan akan kemanfaatan, yaitu tingkatan dimana pengguna percaya bahwa penggunaan teknologi atau sistem akan meningkatkan kinerjanya dalam bekerja. Persepsi manfaat mengacu pada sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan produktivitasnya.

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*).

Perceived ease of use sebagai keyakinan akan kemudahan penggunaan, yaitu tingkatan dimana pengguna percaya bahwa teknologi atau sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah. Kemudahan ini akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi individu terhadap kemudahan penggunaan suatu teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi tersebut.

2.1.3 Pendampingan Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Pendampingan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan UMKM bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Wuryandani & Meilani, 2013). Menurut Arbiyanto & Widodo (2017) pemerintah wajib melakukan pendampingan terhadap UMKM yang ada. Didukung oleh Undang-undang no 20 tahun 2008 yang mengatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

2.1.3.2 Peran Pendampingan Pemerintah

Menurut Gede Diva, 2009 yang dikutip oleh Putra, 2015 pengembangan UMKM dari peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator dan katalisator :

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, peran pemerintah yaitu memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usahanya. Jika ada kelemahan di bidang produksi, tugas pemerintah sebagai fasilitator adalah memberikan tambahan kemampuan UMKM dalam berbagai cara, termasuk pelatihan. Begitu pula jika UMKM lemah secara finansial, tugas fasilitator adalah membantu UMKM menemukan cara untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan.

b. Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan untuk mendorong pengembangan UMKM. Dalam peran ini, pemerintah berupaya menciptakan kebijakan mengenai aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis.

c. Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Dalam peran ini, pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi fast moving enterprise. Fast moving enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi atau akan berubah menjadi usaha besar. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah melakukan berbagai langkah seperti pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif bukan konsumtif, penghargaan terhadap UMKM, dan lain-lain.

2.1.3.3 Aspek aspek dalam Pendampingan Pemerintah

Menurut Ridwan, et.al (2014) menyatakan bahwa dalam pendampingan pemerintah seharusnya terdapat aspek aspek yang harus dilakukan, diantara lain:

1. Kemampuan Ilmu Pengetahuan / Pelatihan

Upaya yang dilakukan oleh dinas untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan bagi pelaku UMKM yaitu melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi peraturan. Misalnya untuk perizinan usaha dan pajak.
- b. Studi banding terhadap usaha lain untuk bahan evaluasi mengenai perbaikan dan pengembangan.
- c. Pelatihan operasional usaha dan pembukuan.

2. Fasilitasi Permodalan/Sarana Produksi

- a. KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendapatkan tambahan modal pelaku usaha.
- b. Bantuan sarana produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk sehingga produk yang dihasilkan dapat berdaya saing tinggi.

3. Fasilitasi Pemasaran

- a. Fasilitasi outlet penjualan sehingga dapat meningkatkan penjualan produk.
- b. Promosi atau pameran, karena kegiatan promosi/pameran adalah peluang yang baik untuk memperoleh penjualan secara maksimal.
- c. Sertifikasi untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yg dijual. Misalnya, menerapkan standart Halal untuk produk makanan/minuman.

2.1.3.4 Tujuan Pendampingan Pemerintah

Arbiyanto & Widodo (2017) juga menyampaikan tujuan dari pendampingan pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Pendampingan tersebut bertujuan untuk menjadikan UMKM sebagai UMKM yang tangguh dan mandiri seperti halnya yang tercantum pada Undang-undang no 20 tahun 2008.

2. Pendampingan dibuat agar pemilik UMKM merasa diperhatikan oleh pemerintah dan semakin termotivasi untuk berkembang.

2.1.4 Perkembangan UMKM

Menurut Purwanti (2012) perkembangan UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu karakteristik wirausaha, modal usaha, dan strategi pemasaran. Munizu (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkembangan UMKM dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal usaha. Faktor eksternal yang mempengaruhi adalah aspek kebijakan pemerintah, aspek sosial budaya dan ekonomi serta aspek peranan lembaga pemerintah. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh adalah aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek Teknik produksi atau operasional serta aspek pasar dan pemasaran.

Menurut Tanjung (2017) perkembangan UMKM bergantung kepada pemenuhan setiap aspek usahanya baik itu finansial maupun non-finansial. Tanjung (2017) dalam bukunya menyatakan bahwa terdapat empat aspek pokok yang mempengaruhi perkembangan UMKM yaitu:

1. Manajemen

- a. Berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Pemahaman pasar dan pengetahuan dasar dalam menjalankan usaha dapat memengaruhi baik tidak tidaknya pelaku usaha dalam mengelola usahanya. Terkadang UMKM tidak memahami penggunaan teknologi untuk mempermudah kegiatan usaha, sehingga semuanya dilakukan dengan manual. Tetapi, tidak hanya pemilik usaha, efisiensi karyawan juga mempengaruhi keberhasilan pengelolaan perusahaan. Maka ada beberapa poin yang menjadi perhatian yaitu :
- b. Pemilik usaha yang baik harus memahami bagaimana manajemen usaha yang benar.
- c. Karyawan yang dipekerjakan harus memahami proses bisnis yang dilakukan pada kegiatan usaha

2. Produksi dan Pemasaran

Pada proses produksi berhubungan langsung dengan harga bahan baku dan peralatan produksi. Kualitas, kuantitas, target produksi dan keuntungan produksi dapat dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan harga bahan baku serta ketersediaan alat produksi yang dimiliki. Terkait pemasaran, semakin baik pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha maka semakin mudah menarik konsumen untuk mengenal dan membeli produk. Karena dapat menjadi salah satu alternatif dalam memperkenalkan sektor UMKM dan produk UMKM kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM. Adapun media yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam melakukan pemasaran seperti media cetak dan media onlen. Selain itu, ada juga peran pemerintah yang dapat membantu mengembangkan UMKM dalam hal pemasaran yaitu dapat mengadakan acara pameran.

3. Keuangan

Keuangan merupakan aspek yang sangat penting dan wajib diperhatikan karena dengan lancarnya dana usaha dapat memengaruhi kelancaran aspek lainnya. Seringkali aspek keuangan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan aspek lainnya. Untuk mengatasi kendala tersebut, pelaku usaha perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan catatan keuangannya sebagai syarat mendapatkan bantuan KUR dari pemerintah
- b. Memanfaatkan semaksimal mungkin bantuan KUR yang telah diterima untuk pengembangan usaha.

Terkadang bantuan pemerintah yang diberikan tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelaku ekonomi karena merasa terbebani dengan syarat penerimaan KUR ini, yaitu menggunakan catatan aktivitas keuangan yang jelas sebagai acuan untuk memberikan tambahan modal usaha. Masih banyak pelaku usaha di sektor ini yang tidak melakukan pencatatan keuangan atau pembukuan perusahaannya.

4. Hukum atau regulasi

Hukum memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis guna mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Hukum dibuat sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan pihak-pihak seperti konsumen dan produsen. Hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha adalah:

- a. Pengurusan izin usaha untuk memperoleh legalitas bagi usaha yang dimiliki
- b. Pengurusan sertifikasi produk. Padahal, memperoleh legalitas seperti izin usaha dan sertifikasi produk dapat menjadi salah satu cara untuk memudahkan perusahaan memperoleh konsumen atau pasar karena status produknya legal dan aman bagi konsumen. Misalnya seperti menerapkan produk halal untuk produk makanan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan pada daerah yang berbeda-beda. Penelitian ini meneliti perkembangan UMKM melalui variabel literasi keuangan, *Financial Technology* dan pendampingan pemerintah dengan menggunakan responden di Kota Malang.

Pada penelitian Ariwibawa (2016) menyatakan adanya pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha UMKM kreatif di Jawa Tengah. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Berarti, apabila tingkat literasi keuangan seorang pemilik sebuah UMKM semakin tinggi maka kinerja yang dapat dicapai oleh UMKM tersebut akan semakin meningkat. Menurut penelitian Anggraeni (2016) tingkat literasi keuangan dari pemilik usaha yang rendah dapat berpengaruh terhadap kemampuan mengelola keuangan. Kedua penelitian diatas bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Iqnatia et.al (2021) dan Wicaksono (2019) yang menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap

perkembangan UMKM. Artinya literasi keuangan tidak menjadi acuan dalam mengembangkan usaha.

Rahardjo dkk (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perkembangan UMKM di Kota Magelang turut terpengaruh oleh pesatnya perkembangan *FinTech*, namun tidak seluruh dari UMKM yang ada memanfaatkan *FinTech* dikarenakan oleh minimnya pengetahuan yg dimiliki. Sedangkan menurut hasil penelitian oleh Fajar & Larasati (2021) *FinTech* memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan UMKM di Indonesia. *FinTech* dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online.

Sulastri & Dilastri (2015) menyatakan pemerintah Kota Pariaman sangat pro-aktif sekali dalam melakukan pendampingan. Namun, peran aktif pemerintah tidak sejalan dengan keinginan pelaku UKM kerajinan sulaman Kota Pariaman yang ingin merubah diri sehingga setiap tahunnya jumlah UKM semakin menurun. Sedangkan penelitian Arbiyanto & Widodo (2017) menyatakan Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya UMKM Kulit di Desa Masin setiap tahun.

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

| Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Tujuan Penelitian | Variabel | Sampel | Metode Analisi / Model | Kesimpulan Hasil |
|--------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| Ariwibawa (2016) | Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja dan Keberlangsungan Umkm di Jawa Tengah | Menganalisis dampak literasi keuangan (financial literacy) terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM kreatif di Jawa Tengah. | Variabel Bebas: Literasi Keuangan Variabel Terikat: Kinerja dan keberlanjutan usaha. | Perusahaan yang berasal dari empat kota yaitu Yogyakarta, Magelang, Surakarta dan Semarang | Cross sectional study / Model persamaan struktural | Terdapat pengaruh yang signifikan dari literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlanjutan UMKM. Artinya, danya pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha UMKM kreatif di Jawa Tengah. |
| Anggraeni (2016) | Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Pemilik Usaha terhadap Pengelolaan Keuangan. Studi Kasus: Umkm Depok | Mengetahui tingkat literasi pemilik UMKM dalam mengelola keuangan Usaha dan mengetahui | Variabel Bebas: Literasi keuangan Variabel Terikat: Pengelolaan keuangan | 12 sampel UMKM di wilayah Depok yang dipilih secara acak. | Statistik deskriptif serta pembobotan pada tingkat literasi keuangan | Terdapat pengaruh literasi keuangan pemilik usaha terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Artinya, literasi keuangan |

| | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | faktor literasi keuangan yang mempengaruhi pemilik usaha untuk mengelola keuangan yang lebih baik | | | | mempengaruhi pelaku UMKM dalam mengatur keuangan dan mendapatkan alternatif pendanaan. |
| Iqnatia dkk (2021) | Pengaruh Literasi Keuangan, Inovasi, Dan Peran Pemerintah terhadap Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah | Mengetahui pengaruh literasi keuangan, inovasi, dan peran pemerintah dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. | Variabel Bebas : Literasi Keuangan, Inovasi, Dan Peran Pemerintah Variabel Terikat: Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah | 100 UKM kecamatan Cipayung, Jakarta Timur | Metode analisis Partial Least Square (PLS) | Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah. Inovasi berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah. Peran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha kecil dan menengah. |
| Wicaksono (2019) | Pengaruh Literasi Keuangan, <i>Financial Technology</i> dan | Mengetahui pengaruh literasi keuangan, | Variabel Bebas : Literasi | Anggota Paguyuban IKM Tempe | Kuantitatif Eksplanasi | Literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|---|--|
| | Pendampingan Pemerintah terhadap Perkembangan UMKM | <i>FinTech</i> , dan Pendampingan Pemerintah terhadap Perkembangan UMKM. | Keuangan, <i>Financial Technology</i> dan Pendampingan Pemerintah Variabel Terikat : Perkembangan UMKM | dan Kripik TempeSanan Kota Malang yang berjumlah 45 orang. | | perkembangan UMKM. <i>FinTech</i> dan pendampingan pemerintah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. |
| Rahardjo dkk (2019) | Pengaruh <i>Financial Technology (Fintech)</i> terhadap Perkembangan Umkm di Kota Magelang | Mengetahui dampak <i>FinTech</i> terhadap delapan belas UMKM yang ada di kota Magelang. | Variabel Bebas: <i>Financial Technology</i> Variabel Terikat: Kinerja UMKM | Delapan belas UMKM yang ada di kota Magelang. | Kualitatif deskriptif | Terdapat pengaruh yang signifikan dari <i>financial technology</i> terhadap perkembangan UMKM. Artinya, <i>FinTech</i> berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM. |
| Fajar & Larasati (2021) | Peran <i>Financial Technology (Fintech)</i> dalam Perkembangan UMKM di Indonesia: Peluang dan Tantangan | untuk mendeskripsikan peranan <i>FinTech</i> dalam perkembangan UMKM di Indonesia disertai | Variabel Bebas: <i>Financial Technology</i> Variabel Terikat: Perkembangan UMKM | berbagai sumber referensi mengenai topik dan permasalahan yang dibahas | kajian dan analisis deskriptif kualitatif | Terdapat pengaruh yang signifikan dari <i>financial technology</i> terhadap perkembangan UMKM. Artinya, <i>FinTech</i> dapat membantu pelaku |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--|
| | | penjelasan mengenai peluang serta tantangan yang dihadapi. | | | | UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. |
| Sulastris & Dilastri (2015) | Peran Pemerintah Dan Akademisi Dalam Memajukan Industri Kreatif Kasus Pada UKM Kerajinan Sulaman Di Kota Pariaman | Melihat bagaimana peran dari universitas (akademisi, program pemerintah dan wirausaha) dalam memajukan UKM pada UKM kerajinan Sulaman di Kota Pariaman Sumatera | Variabel Bebas: Peran pemerintah dan akademisi Variabel Terikat: Kemajuan industri kreatif | 25 pemilik UKM kerajinan sulaman. | Analisis data kualitatif | Terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari pendampingan pemerintah terhadap perkembangan UMKM. Karena adanya peran aktif pemerintah tidak sejalan dengan keinginan pelaku UKM kerajinan sulaman Kota Pariaman sehingga |

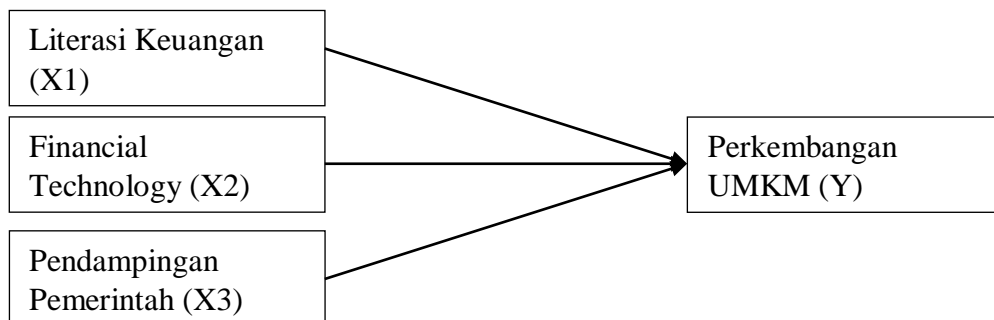
| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | Barat. | | | | setiap tahunnya jumlah UKM semkain menurun. |
| Arbiyanto & Widodo (2017) | Model Pendampingan Usaha oleh Pemerintah kepada Umkm Kulit Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang | Untuk mengetahui Pendekatan dan metode yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pendampingan di kelompok usaha industri kulit. Serta untuk mengetahui aspek-aspek yang menjadi sasaran pendampingan usaha oleh pemerintah di kelompok usaha industri kulit. | Variabel Bebas: Pendampingan usaha Variabel Terikat: Perkembangan UMKM | UMKM Kulit Desa Masin kecamatan Warungasem kabupaten Batang | Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif | Terdapat pengaruh yang signifikan positif dari pendampingan pemerintah terhadap UMKM. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya UMKM Kulit di Desa Masin setiap tahun. |

2.3 Metode Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian. Model konseptual atau kerangka konseptual dalam suatu penelitian adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara faktor atau variabel yang dianggap penting untuk menganalisis masalah penelitian. Tujuan dari model konseptual adalah untuk menyajikan gambaran umum dari konsep penelitian dan akan menjadi dasar perumusan hipotesis oleh peneliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan judul dengan variabel bebas (*independent variabel*) Literasi Keuangan (X1), *Financial Technology* (X2), Pendampingan Pemerintah (X3) serta variabel terikat (*dependent variabel*) adalah Perkembangan UMKM (Y).

Gambar 2. 1
Model Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

X1, X2, X3 = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

→ = Pengaruh masing-masing variabel X secara parsial terhadap variabel Y

2.4 Pengembangan Hipotesis

- a. H1 : Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM

Seseorang dengan literasi keuangan yang baik, akan mampu memandang uang dengan sudut pandang yang berbeda serta mempunyai kendali atas kondisi keuangannya. Orang tersebut akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara memanfaatkan terhadap uang yang dimilikinya. Purwanto dan Mustamu (2013) menyatakan bahwa literasi keuangan yang baik, selain dapat membantu mengelola keuangan dan mengambil keputusan yang tepat, juga dapat membantu UKM dalam memperoleh pendanaan atau modal. Menurut penelitian Ariwibawa (2016) adanya pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha UMKM kreatif di Jawa Tengah.

- b. H2 : *Financial Technology* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM

Dampak yang dapat dicapai melalui pemanfaatan *FinTech* adalah *FinTech* dapat membantu pelaku UMKM dalam memberikan kemudahan dan efisiensi dalam hal pengelolaan keuangan berbasis teknologi meliputi digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. Menurut penelitian Rahardjo dkk (2019) menyatakan bahwa perkembangan UMKM di Kota Magelang turut terpengaruh oleh pesatnya perkembangan *FinTech* yang berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM yaitu berupa peningkatan efisiensi operasional, dan efisiensi yang dinikmati oleh anggotanya.

- c. H3 : Pendampingan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM

Dengan berkembangnya UMKM di daerah seharusnya diiringi dengan perhatian pemerintah daerah agar UMKM yang ada bisa tetap eksis bahkan berkembang supaya bisa meningkatkan perekonomian daerah (Arbiyanto & Widodo, 2017). Dibuktikan dalam penelitian Arbiyanto & Widodo (2017) pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah sudah

baik, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya UMKM Kulit di Desa Masin setiap tahun. Tugas dari pemerintah Kabupaten Batang dalam melakukan pendampingan usaha kepada UMKM Kulit Desa Masin adalah memberikan motivasi agar pemilik UMKM Kulit terus termotivasi dalam mengembangkan usahanya. Selain itu tugas pemerintah Kabupaten Batang yang lain adalah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap perkembangan UMKM Kulit Desa Masin. Berdasarkan penelitian terdahulu membuktikan bahwa pendampingan pemerintah memengaruhi perkembangan UMKM.